



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA TINELO KECAMATAN TILANGO KABUPATEN GORONTALO

### *IMPLEMENTATION OF NON-CASH FOOD ASSISTANCE POLICY (BPNT) IN TINELO VILLAGE, TILANGO DISTRICT, GORONTALO REGENCY*

Siti Amelia Giu<sup>1\*</sup>, Zuchri Abdussamad<sup>2</sup>, Irawati Igrisa<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Email: [amelgiu30@gmail.com](mailto:amelgiu30@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Email: [zuchriabdussamad@ung.ac.id](mailto:zuchriabdussamad@ung.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Email: [irawatyigirisa17@ung.ac.id](mailto:irawatyigirisa17@ung.ac.id)

\*email koresponden: [amelgiu30@gmail.com](mailto:amelgiu30@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2687>

#### *Abstrack*

*This research aims to analyze the Implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) Distribution Policy in Tinelo Village, Tilango District, Gorontalo Regency. The focus of this research is the implementation of the BPNT policy viewed from the aspects of (a) communication, (b) resources, (c) disposition, and (d) bureaucratic structure. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data sources were obtained thru in-depth interviews with the Village Head, Village Secretary, Head of the People's Welfare Section as the BPNT facilitator, as well as the beneficiary community (KPM), supported by observation and documentation. The research results indicate that the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) distribution policy in Tinelo Village, Tilango District, Gorontalo Regency has not yet been fully optimal. In the aspect of communication, there are still obstacles in the dissemination of information that has not been evenly distributed to Beneficiary Families (KPM). In terms of resources, the implementation of the program has been supported by adequate human resources and facilities, which can facilitate the smooth distribution of aid. In terms of disposition, policy implementers demonstrate commitment, responsibility, and a good attitude in carrying out their duties in accordance with the applicable regulations. Meanwhile, in the aspect of bureaucratic structure, discrepancies were still found in the implementation of Standard Operating Procedures (SOP). Nevertheless, the BPNT program has provided benefits in helping to meet the food needs of the beneficiary community in Tinelo Village. The research conclusion shows that the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) distribution policy in Tinelo Village, Tilango District, Gorontalo Regency, is not yet fully optimal due to obstacles in communication and bureaucratic structure. Therefore, it is necessary to improve the dissemination of information to KPM and strengthen compliance with Standard Operating Procedures (SOP) so that the implementation of the BPNT program can run more effectively and on target.*

**Keywords:** *Implementation of the BPNT Policy, Beneficiary Families (KPM), George C. Edward III, Executor Disposition, Bureaucratic Structure.*



### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan BPNT yang ditinjau dari aspek (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selaku pendamping BPNT, serta masyarakat penerima manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek komunikasi masih ditemukan kendala dalam penyebaran informasi yang belum merata kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kelancaran penyaluran bantuan. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, program BPNT telah memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di Desa Tinelo. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi kepada KPM serta penguatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan BPNT, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), George C. Edward III, Disposisi Pelaksana, Struktur Birokrasi.

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan realitas sosial kompleks di negara berkembang yang dipengaruhi oleh pengangguran, rendahnya pendidikan, ketimpangan kesejahteraan, dan rendahnya pendapatan. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 34 ayat (1), Pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program bantuan sosial, salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diatur dalam Permensos No. 20 Tahun 2019 sebagai transformasi dari program Raskin/Rastra.

BPNT memberikan bantuan non-tunai senilai Rp200.000 per bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akun elektronik (Kartu Keluarga Sejahtera) dan bank-bank Himbara. Bantuan ini hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan bernutrisi seimbang (beras, telur, tahu, tempe) di *e-Warong* atau Rumah Pangan Kita (RPK), bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta mengurangi beban pengeluaran KPM.

- a. Evaluasi Latar Belakang dan Kesenjangan Penelitian
- b. Sejumlah penelitian terdahulu mengenai BPNT menunjukkan hasil yang bervariasi:
- c. Desa Pojokkulon (Jombang): Berjalan sesuai aturan meski ada kendala keterlambatan pencairan.
- d. Desa Rantau Jaya Udik (Lampung Timur): Menghadapi masalah serius akibat ketidakvalidan data KPM (*malfunction*) dan rendahnya literasi teknologi.



- e. Kota Cimahi: Manajemen lebih transparan, tetapi terkendala kuota data pusat yang tidak sinkron dengan realisasi lapangan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, kondisi di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo memiliki karakteristik pedesaan dengan ketergantungan tinggi pada aparat desa. Selain itu, belum ada penelitian lokal yang menggunakan Teori Implementasi George C. Edward III. Ditambah lagi, data menunjukkan tren kenaikan jumlah penerima BPNT yang signifikan di Desa Tinelo, yaitu:

- 2023: 67 KPM
- 2024: 90 KPM
- 2025: 104 KPM

#### Analisis Masalah Berdasarkan Teori Edward III

Observasi awal di Desa Tinelo menunjukkan bahwa program BPNT belum berjalan optimal akibat kendala pada empat indikator utama teori Edward III:

- a. Komunikasi: Sosialisasi belum optimal. KPM menerima informasi yang berbeda-beda dan kurang memahami mekanisme serta jadwal pencairan bantuan.
- b. Sumber Daya: Terjadi keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM (aparat desa serta pendamping sosial), didukung oleh sarana prasarana administrasi yang belum memadai.
- c. Disposisi (Sikap Pelaksana): Komitmen pelaksana belum seragam. Masih ditemukan aparat atau pendamping yang kurang proaktif dalam menyelesaikan keluhan KPM.
- d. Struktur Birokrasi: Pembagian tugas dan koordinasi antarlembaga belum efektif meskipun Standar Operasional Prosedur (SOP) formal sudah tersedia.

## 2. METODE PENELITIAN

### a. Lokasi, Pendekatan, dan Kehadiran Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, selama 4 bulan (Februari–Mei 2026). Lokasi ini dipilih karena memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang cukup banyak.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena sosial secara holistik dan alami. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*key instrument*) yang hadir langsung di lapangan untuk mengumpulkan data, memahami situasi sosial, dan membangun hubungan baik dengan informan.

### b. Data, Sumber Data, dan Informan

- Data Primer: Diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
- Data Sekunder: Bersumber dari data tidak langsung seperti dokumen, arsip, dan laporan relevan.
- Informan Penelitian: Ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* (sengaja berdasarkan kriteria ahli). Informan terdiri dari 8 orang, yaitu: Kepala Desa (Informan Kunci), Sekretaris Desa, Kasie Kesra/Pendamping BPNT, dan 5 orang KPM (Responden). Jumlah informan berkembang hingga mencapai titik kejenuhan data.



### c. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data menggunakan tiga teknik utama:

1. Observasi: Pengamatan sistematis menggunakan pancaindra terhadap dinamika objek.
2. Wawancara: Tanya jawab lisan untuk mengonstruksikan makna dari informan.
3. Dokumentasi: Pengumpulan data tertulis, visual, maupun verbal.

Analisis data mengikuti model Miles, yang meliputi tiga tahapan:

- Reduksi Data: Menyederhanakan, merangkum, memilah, dan membuang data yang tidak relevan.
- Penyajian Data: Menampilkan data tereduksi dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau kutipan langsung.
- Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Menyimpulkan makna data secara bertahap sejak awal hingga akhir penelitian untuk memahami implementasi, hambatan, serta dampak program BPNT.

### d. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data di lapangan, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yang terdiri dari:

- Triangulasi Teknik: Menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- Triangulasi Sumber: Menguji informasi yang sama kepada 3 sumber berbeda.
- Triangulasi Waktu: Memanfaatkan variasi waktu pengambilan data (misalnya pagi hari) demi akurasi informasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Ringkasan ini disusun berdasarkan empat dimensi teori implementasi kebijakan George C. Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### a. Komunikasi

Menurut George C. Edward III, komunikasi adalah faktor mendasar yang mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi agar suatu kebijakan dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh pelaksana maupun kelompok sasaran.

- Kondisi di Lapangan: Aparat desa dan pendamping sosial telah melakukan sosialisasi mengenai jadwal penyaluran, mekanisme penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta prosedur penerimaan bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Hambatan: Proses komunikasi belum sepenuhnya optimal dan merata. Masih ada warga yang menerima informasi secara tidak langsung (dari sesama penerima) dan belum memahami prosedur secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa kesamaan pemahaman belum sepenuhnya tercapai.
- Perbandingan Studi: Kondisi ini sejalan dengan teori Igirisa (2022) bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh komunikasi pelaksana dengan masyarakat. Hambatan di Desa Tinelo mirip dengan temuan Ridho dan Saipul (2025) di Kota Bontang mengenai informasi yang tidak merata. Namun, jika di Bontang hambatan dipicu oleh sistem



informasi perkotaan, di Desa Tinelo hambatan lebih disebabkan oleh karakteristik masyarakat desa yang sangat bergantung pada aparat dan pendamping. Sebaliknya, penelitian Mufatiroh et al. (2023) menunjukkan pemanfaatan media sosial yang lebih baik, sementara studi di Desa Balai Makam melihat kelemahan utama pada minimnya sosialisasi perangkat desa.

#### b. Sumber Daya

Sumber daya meliputi kuantitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM), informasi, fasilitas pendukung, kewenangan, serta finansial. Kebijakan tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan aspek-aspek ini.

- Kondisi di Lapangan: Sumber daya untuk program BPNT di Desa Tinelo sudah memadai. Jumlah SDM—termasuk pendamping BPNT dan pemerintah desa—dinilai cukup serta mampu menjalankan fungsi pelayanan dan pendampingan dengan baik. Fasilitas pendukung seperti kepemilikan KKS, rekening bank, dan keberadaan agen BRILink yang mudah diakses turut memperlancar pencairan dana.
- Perbandingan Studi: Temuan ini sesuai dengan teori George C. Edward III dan Igrisa (2011) mengenai pentingnya kompetensi staf serta fasilitas pendukung. Berbeda dengan kasus di Kota Bontang (Ridho dan Saipul, 2025) yang mengalami keterbatasan anggaran, atau Kelurahan Sumpat (Mufatiroh et al., 2023) yang terkendala gangguan teknis mesin EDC, Desa Tinelo tidak menghadapi masalah fasilitas. Kompetensi pelaksana di Tinelo juga jauh lebih baik dibanding Desa Balai Makam yang sempat mengalami salah data akibat keterbatasan kemampuan perangkatnya.

#### c. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Disposisi berkaitan dengan komitmen, kemauan, dan tanggung jawab pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik nyata di lapangan.

- Kondisi di Lapangan: Aspek disposisi di Desa Tinelo menunjukkan kinerja yang sangat baik. Aparat desa dan pendamping sosial menunjukkan komitmen yang kuat, bersikap ramah, terbuka, serta responsif terhadap kendala dan pertanyaan warga. Mereka secara aktif mengedukasi KPM agar bantuan pangan yang diterima dimanfaatkan secara tepat guna dan optimal. Sikap positif ini berhasil membangun hubungan emosional yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.
- Perbandingan Studi: Hal ini memperkuat pandangan Igrisa (2022) serta Abdussamad et al. (2023) dalam penelitian Arifah et al. yang menyatakan bahwa komitmen implementor mempermudah pencapaian tujuan program. Dibandingkan dengan studi Ridho dan Saipul (2025), pelaksana di Desa Tinelo dinilai jauh lebih proaktif dan responsif dalam memberikan pendampingan langsung di lapangan.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup kejelasan pembagian tugas, koordinasi antar-instansi, dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).

- Kondisi di Lapangan: Alur birokrasi penyaluran BPNT di Desa Tinelo sudah terstruktur secara berjenjang dari tingkat desa, Dinas Sosial Kabupaten, Provinsi, hingga



Pemerintah Pusat. Pembagian kerja dan koordinasi harian antar-pelaksana berjalan harmonis.

- Hambatan: Ditemukan dua kendala utama pada dimensi ini:
  1. Keterbatasan Kuota: Pengambilan keputusan final berada di tingkat pusat, sehingga banyak usulan warga layak dari pemerintah desa yang tidak dapat diakomodasi.
  2. Pelanggaran SOP oleh KPM: Masih ada warga yang menitipkan atau mempercayakan kartu KKS mereka kepada orang lain untuk dicairkan. Tindakan ini memicu kesalahpahaman informasi, keterlambatan pencairan, hingga keluhan selisih saldo.
- Perbandingan Studi: Pola ini sejalan dengan pemikiran Igirisa (2022) mengenai pentingnya mekanisme kerja yang terstruktur. Jika di Bontang (Ridho dan Saipul, 2025) hambatan bersumber dari birokrasi yang rumit bagi warga, di Desa Tinelo masalahnya terletak pada kedisiplinan warga terhadap SOP serta keterbatasan kuota vertikal. Di sisi lain, pentingnya kepatuhan SOP dan koordinasi yang baik ini juga terkonfirmasi pada studi Mufatiroh et al. (2023) dan kasus di Desa Balai Makam.

Implementasi kebijakan BPNT di Desa Tinelo secara umum telah berjalan dengan baik, didukung oleh sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang responsif, serta struktur birokrasi yang jelas. Namun, efektivitas program masih perlu ditingkatkan pada dimensi komunikasi agar informasi tersebar lebih merata, serta pengawasan terhadap kepatuhan SOP agar para Keluarga Penerima Manfaat tidak menyalahgunakan atau menitipkan kartu KKS mereka kepada pihak lain.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### a. Aspek Komunikasi

Implementasi kebijakan BPNT pada aspek komunikasi belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum memperoleh informasi secara merata mengenai mekanisme penyaluran bantuan, jadwal pencairan, serta ketentuan program BPNT. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pendamping sosial telah dilaksanakan, namun penyampaian informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh penerima manfaat sehingga masih terjadi perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat.

##### b. Aspek Sumber Daya

Implementasi kebijakan BPNT pada aspek sumber daya telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan program didukung oleh sumber daya manusia yang terlibat, baik pemerintah desa, pendamping sosial, maupun pihak terkait lainnya. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia dinilai cukup memadai untuk mendukung proses penyaluran bantuan sehingga program dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



### c. Aspek Disposisi

Implementasi kebijakan BPNT pada aspek disposisi telah berjalan dengan baik. Pelaksana program menunjukkan sikap tanggung jawab, komitmen, dan kepedulian dalam menjalankan tugasnya. Aparat desa dan pendamping sosial berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh KPM selama proses penyaluran bantuan berlangsung.

### d. Aspek Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan BPNT pada aspek struktur birokrasi secara umum telah memiliki pembagian tugas dan alur koordinasi yang jelas antara pemerintah desa, pendamping sosial, dan instansi terkait. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta keterbatasan dalam pengambilan keputusan terkait kuota penerima bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Berdasarkan keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat permasalahan pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Sementara itu, aspek sumber daya dan disposisi telah mendukung pelaksanaan program dengan baik sehingga program BPNT tetap memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Abdussamad, Z., Igrisa, Irawaty Arifah, A., Pascasarjana, P., & Negeri, U. (2023). Implementasi Kebijakan Program Gernas Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Normalita*, 11.
- Djaenal, R., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan.
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi. *Journal Of Humanities And Social Studies*, 1(1), 1–9.
- Fiantika, F. R., & Maharani, A. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Issue April)*.
- Forensa, D., Alfatah, D., Rahayu, N., & Faridah. (2024). Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui Metode E-Warung Dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- Igrisa, I Tahir A, Alisaha, M. S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
- Igrisa, I. (2011). Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Dalam Kebijakan Pengembangan Usaha Tani Di Kabupaten Gorontalo.
- Igrisa, I. (2022). Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris.
- Igrisa, I., Pd, S., Ketua, M. S. N., Isa, R. A., Anggota, M. M. N., & Manajemen, J. (2012). ( Studi Kasus Pada PKBM Kec . Tilango Kab . Gorontalo ) PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN. 0028097104(September), 1–136.



- Julianto, P. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai. 1(1), 38–43.
- Kaku, O. B., Abdussamad, J., & Tui, F. P. (2023). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Tilogkabila Kabupaten Bone Bolango.
- Kawung, M. A., Et Al. (2020). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga Penerima Manfaat.
- Mendrofa, R., Pembinaan, U., Indonesia, M., Publik, K., & Administrasi, T. (2024). 387-392+06.+ARTIKEL+GENTA+MULIA+VOL+15+NO+1+TAHUN+2023+(Titi+Rawati+Gulo). 15(1), 387–392.
- Mufatiroh, E., Ratnawati, S., & Kurniawan, B. A. (2021). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E-Warung.
- Negara, J. A., Kebijakan, I., & Bpnt, P. (2022). Sawala Sawala. 10(2), 266–280. <https://doi.org/10.30656/Sawala.V10i2.4932>
- Program, I., & Pangan, B. (2025). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON Ejournal Administrasi Publik. 13(2), 499–507.
- Putra Kaslin Hutabarat, R. F. M. U. P., & Program. (2025). Analisis Kebijakan Publik Dalam Pengambilan Keputusan Politik Indonesia. Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic), 11(1), 23–29. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/civic/article/view/7097>
- Pratiwi, D. A., Sukamto, S., & Anwar, H. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.
- Ristanti, E. Y., & Fadhli, K. (2022). Analisis Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Penelitian Ekonomi, 6(2), 21–27.
- Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh, 5(4), 18–19. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407>
- Ramadani, & Sihombing, R. S. M. (2024). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Tebing Tanjung Kabupaten Langkat. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 164–174.